

**PENGENDALIAN DALAM PENERTIBAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
PABRIK DI KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG
(STUDI PADA BPLHD KABUPATEN BANDUNG)**

Oleh:

Nia Pusparini Aqil, Emi Rachmawati

email: niapusparini09@gmail.com; e.rachmawati26@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Pengendalian BPLHD dalam Penertiban IPAL pabrik di kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori koordinasi dari Anthony dan Vijay Govindarajan (2005), berdasarkan dimensi dimensi teori pengendalian melalui dimensi pelacak (*detector*), penilai (*assessor*), dan umpan balik (*effector*). Adapun rumusan proposisi sebagai berikut:

1. Pengendalian IPAL oleh BPLHD di Kawasan Industri Majalaya Kabupaten Bandung berlangsung optimal melalui pendekatan proses-proses pengendalian yang terdiri dari pelacak (*detector*), penilai (*assessor*), dan umpan balik (*effector*).
2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pengendalian IPAL di kawasan Industri Majalaya dapat diatasi oleh BPLHD dengan memenuhi standar baku mutu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui siklus Reduksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor penghambat BPLHD dalam mengendalikan penertiban IPAL Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, antara lain sebagai berikut ini: Terbatasnya SDM di BPLHD, Minimnya anggaran yang disediakan oleh BPLHD dan keterbatasan alat yang dimiliki BPLHD untuk memeriksa hasil pencemaran air limbah industri sehingga belum dapat mengakomodir jumlah pabrik yang tersebar di kawasan industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Kata kunci : Pengendalian, Penertiban IPAL Pabrik.

ABSTRACT

Background problem in this research is not optimal in the BPLHD Control IPAL curbing in the Industrial District of Bandung Regency Majalaya. Analysis conducted research problems using a theoretical approach coordination of Anthony and Vijay Govindarajan (2005), based on the dimension dimensional control theory with dimensional tracking (detector), assessor (assessor), and feedback (effector). Formulate the following proposition:

- 1. Control of the IPAL by BPLHD in Industrial Area Majalaya Bandung regency lasted optimal approach control processes consisting of trackers (detector), appraisers (assessors), and feedback (effector).*
- 2. Inhibiting factor in the process control industry Majalaya IPAL in the region can be overcome by BPLHD to meet quality standards.*

This type of research used in this research is qualitative research. Data collected through, participant observation, interview and documentation. Data analysis was performed through a cycle of data reduction, Dish data and drawing conclusions or data verification. Testing of data is done through validity and reliability. The results showed the inhibiting factors BPLHD in controlling demolition IPAL Industrial Zone District of Majalaya Bandung Regency, among others, the following: Lack of human resources in BPLHDs, lack of a budget provided by BPLHD and limitations of equipment owned BPLD to check the results of water pollution industrial waste that has not been can accommodate the number of factories across the industrial area of the District Majalaya Bandung regency.

Keywords: Control, Factory IPAL, Curbing

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kajian

Sekarang ini pencemaran di dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, Selain itu, pencemaran industri juga berdampak buruk bagi lahan pertanian produktif dan dapat menurunkan kualitas tanah maupun kualitas produk pertanian. Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, di samping nilai ekologi, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian juga bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Kecamatan Majalaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Wilayah Timur Kabupaten Bandung. Kawasan Majalaya seperti kita ketahui adalah merupakan kawasan sentral

Industri tekstil yang telah terbukti dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah, dimana industri tekstil tersebut dengan nyata-nyata mampu membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi ribuan orang tidak dipungkiri bahwa industri tekstil merupakan sektor penting di dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah pusat. Dampak dari limbah industri yang terjadi di Kecamatan Majalaya kemiskinan membuat warga sekitar Sungai Citarum tak punya pilihan kecuali menggunakan air yang tercemar maka penyakit pun membayangi hidup mereka. Sungai Citarum yang melintasi Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selama bertahun-tahun menjadi tempat buangan limbah pabrik tekstil.melalui gorong-gorongnya, pabrik-pabrik itu meluncurkan limbah ke sungai yang sekaligus menjadi sumber air warga setempat.

Masyarakat yang bermukim di Desa Ciwalengke, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya mengeluhkan gatal-gatal di tubuhnya. Penyakit gatal-gatal itu dirasakan merata oleh hampir 1.200 keluarga di Kampung Ciwalengke. Selama puluhan tahun, warga di sana menggunakan air dari Sungai Sasak Benjol, anak Sungai Citarum yang melewati Majalaya. Kampung di Desa tersebut sangat padat. Rumah warga yang

rata-rata berukuran 15 meter persegi berimpitan dalam gang yang lebarnya sekitar 1 meter. Di kanan-kiri kampung adalah perusahaan tekstil yang setiap hari menghasilkan limbah beracun. Limbah yang sama tak terhindarkan ikut dikonsumsi.

Sedikitnya 16 pabrik menggelontorkan limbah kimia langsung ke sungai. Hal itu biasanya dilakukan pada malam hari untuk mengelabui pemantau. Apabila satu pabrik mengeluarkan 400 meter kubik saja per hari, ada 6.400 meter kubik limbah di Sukamaju, belum lagi di kawasan industri lain di Kabupaten Bandung.

Uji kualitas air yang dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat tahun 2014 menyatakan kandungan *chemical oxygen demand (COD)* terbesar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum ditemukan di Majalaya, tepatnya di sekitar Jembatan Koyod. Pada Oktober 2014, kadar COD mencapai 420 miligram (mg) per liter air, jauh di atas ambang batas normal 25 mg per liter.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 pasal 18 Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa, setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus:

- a. Mempunyai izin pembuangan air limbah;
- b. Memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- c. Memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikasi;
- d. Memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
- e. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- f. Melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- g. Melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan masalah pembuangan air limbah ke sumber air, pada kenyataannya terdapat beberapa industri yang terletak di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, diduga tidak mengoperasikan IPAL secara benar. Industri tersebut membuang limbahnya secara langsung ke sungai tanpa diproses di IPAL. Dari beberapa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, sering industri-industri hanya menjalankan IPAL-nya ketika ada pemeriksaan. Bahkan, ketika hujan turun, dimanfaatkan oleh industri untuk membuang limbahnya sehingga air pun berwarna hitam pekat.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh industri, secara teknis operasional berkaitan dengan teknis pengendalian pembuangan limbah ke air menjadi tanggungjawab BPLH. Dasar hukum adalah pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

Menurut sumber dari BPLHD, penulis ilustrasikan mengenai jumlah data penertiban IPAL di Kawasan Industri Majalaya Kabupaten Bandung pada tahun 2015 jumlah industri sebanyak 70 industri, untuk yang taat IPAL sebanyak 58 (lima puluh delapan) dan yang tidak taat IPAL sebanyak 12 (dua belas) industri. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penertiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum berjalan optimal.

Dari fenomena tersebut di atas, terdapat beberapa indikasi lainnya yang memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan limbah pabrik di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat industri yang belum memiliki dokumen perijinan apapun dan/atau dokumen lingkungan.
2. Belum optimalnya sistem kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Kawasan Timur Kabupaten Bandung

3. Beberapa perusahaan Industri belum memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah
4. Pemeriksaan tes laboratorium belum dilaksanakan secara periodik bagi industri yang mengeluarkan limbah.
5. Program pembinaan dan pengawasan yang intensif untuk meningkatkan penataan secara signifikan bagi para pengusaha pabrik industri masih rendah.
6. Pelaporan pengendalian air dari penataan administrasi dan ketentuan teknis banyak dilanggar oleh para pengusaha industri.

Berangkat dari kondisi-kondisi di atas, peneliti mengaplikasikan konsep pengendalian dikarenakan di dalamnya terdapat unsur pengawasan juga terdapat tindakan korektif atau perbaikan. Dimana dalam memahami persoalan penertiban IPAL tersebut, peneliti mencoba menelusuri bagaimana BPLHD Kabupaten Bandung melakukan pengendalian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengendalian Oleh BPLHD dalam penertiban IPAL di

Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengendalian yang dihadapi oleh BPLHD dalam Penertiban IPAL Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai kerangka teoritik di dalam penelitian ini, peneliti memetakan letak setiap variabel sebagai fokus kajian penelitian, berikut ini diuraikan tentang keterkaitan antara pengendalian dalam upaya penertiban IPAL di kawasan industri Majalaya Kabupaten Bandung (Studi pada BPLHD Kabupaten Bandung). Model hubungan antara konsep ini selanjutnya dapat dimaknai sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang dijadikan panduan dalam penelitian, mengutip beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk kepentingan tersebut peneliti berpedoman kepada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengendalian.

Mengingat fokus utama kajian ini merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan pengendalian Defenisi pengendalian yang dikemukakan oleh Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) menunjukkan elemen esensial dari pengendalian dengan definisinya bahwa:

“Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Beberapa aspek dari proses ini dijelaskan melalui kegiatan pengendalian manajemen, yaitu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi, mengomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada, dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.”

Untuk melaksanakan proses pengendalian dilakukan secara bertahap berdasarkan proses-proses pengendalian yang dikemukakan oleh Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) sebagai berikut:

1. Pelacak (*detector*) atau sensor, suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan (informasi mengenai apa yang sedang terjadi).
2. Penilai (*assessor*), suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi

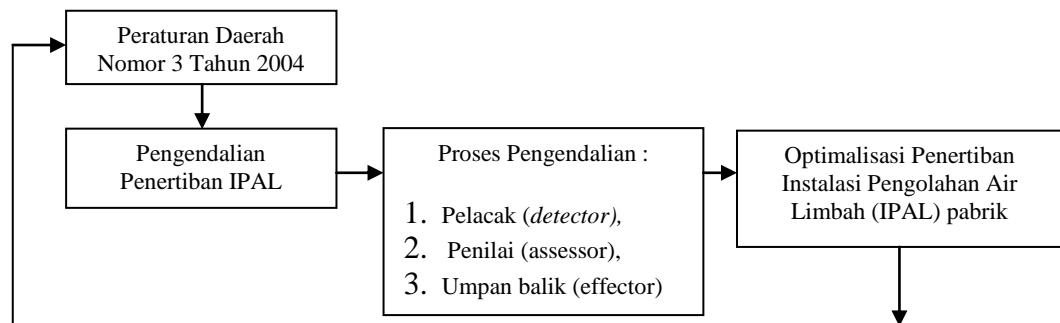
(penbandingan dengan ukuran standar).

3. Umpan balik (*effector*), suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut (perubahan perilaku jika diperlukan).

Dengan demikian pengendalian mengandung arti untuk kegiatan membangunkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma atau peraturan. Keberhasilan melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan tidak terlepas dari pengendalian dengan langkah-langkahnya, dilaksanakan secara benar. Di samping

karena pengendalian juga merupakan suatu proses maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan urusan-urusan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan penilaian sampai dengan tindakan korektif apabila masih terdapat kekurangan atau penyimpangan dari rencana-rencana dan hasil pelaksanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pandangan teoritis tersebut di atas, penulis menetapkan pola pikir guna memudahkan pemahaman sekaligus menjadi acuan dalam penulisan untuk melaksanakan penelitian. Hal ini dapat diilustrasikan melalui model paradigma penelitian dari gambar berikut ini:



Paradigma Penelitian

Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, peneliti mencoba merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Pengendalian IPAL oleh BPLHD di Kawasan Industri Majalaya Kabupaten Bandung berlangsung optimal melalui

pendekatan proses-proses pengendalian yang terdiri dari pelacak (*detector*), penilai (*assessor*), dan umpan balik (*effector*).

2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pengendalian IPAL di kawasan Industri Majalaya dapat diatasi oleh

BPLHD dengan memenuhi standar baku mutu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008:8) mengemukakan metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama dan dinamakan metode *postpositivist*, karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kuantitas. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi (hasil yang dicapai) terhadap data yang ditemukan di lapangan.

PEMBAHASAN

Dalam memecahkan masalah penelitian ini, peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori mengutip pendapat dari Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) dengan mengajukan konsep dasar proses-proses pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Pelacak (*Detector*)

Pelacak (*detector*) atau sensor, merupakan suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi

dalam proses yang sedang dikendalikan (informasi mengenai apa yang sedang terjadi). Dalam dimensi ini mencoba untuk memberikan pertanyaan pada para informan yang terdiri atas:

- a. Pemeriksaan secara berkala ke lapangan.
- b. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada pemilik industri.
- c. Kelengkapan memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana
- d. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa pemeriksaan IPAL ke industri-industri seharusnya dalam 1 tahun dua kali dilakukan secara berkala, namun dalam pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun. Dengan lamanya jangka waktu pemeriksaan yang hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun sangat menguntungkan bagi pengusaha pabrik industri yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut mengakibatkan adanya opini negatif dari masyarakat bahwa BPLHD telah menyalahgunakan wewenangannya.

2. Penilai (*Assessor*)

Dari hasil observasi di lapangan, ternyata tidak sedikit perusahaan industri yang masih aktif berjalan dengan membuang limbah langsung ke sungai tanpa diolah dahulu dengan IPAL. Hal ini mengakibatkan makin tingginya tingkat

pencemaran baik kualitas maupun kuantitas, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.

3. Umpan Balik (*Affector*)

Dari pengertian dimensi umpan balik (*affektor*) merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut (perubahan perilaku jika diperlukan). Dalam dimensi ini mencoba untuk memberikan pertanyaan pada para informan yang terdiri atas:

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil uji standar Baku Mutu di laboratorium
- b. Sanksi pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi (Wawancara: Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan, Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bidang Konservasi dan pengendalian Kerusakan Lingkungan).

Faktor Faktor Penghambat BPLHD dalam Penertiban IPAL Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Faktor penghambat BPLHD dalam penertiban IPAL Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, berdasarkan penelusuran melalui observasi, wawancara, dan laporan dari informan dapat peneliti ilustrasikan berikut ini:

1. Terbatasnya SDM di BPLHD
2. Minimnya anggaran yang disediakan oleh BPLHD
3. Keterbatasan alat yang dimiliki BPLD untuk memeriksa hasil pencemaran air limbah industri sehingga belum dapat mengakomodir jumlah pabrik yang tersebar di kawasan industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 pasal 18 Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air .menyebutkan bahwa, setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus, mempunyai izin pembuangan air limbah, memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), memiliki operator dan

penanggung jawab Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikasi, memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah, mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah, melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan model pengendalian yang dikemukakan oleh Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) menunjuk pada tiga variabel proses-proses pengendalian, yaitu melalui dimensi Pelacak (*detector*) atau sensor, Penilai (*assessor*) dan Umpan balik (*effektor*). Pelacak (*detector*) atau sensor merupakan suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan (informasi mengenai apa yang sedang terjadi).

- a. Dalam konteks dimensi Pelacak (*detector*). hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pemeriks IPAL ke industri-industri seharusnya dalam 1 tahun dua kali dilakukan secara berkala,

namun dalam pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun. Pelacak (*detector*) sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari penertiban IPAL Pabrik industri. salah satu pendukung dalam melancarkan tugas di lapangan diperlukan perangkat atau alat pengontrol yang perlu untuk disosialisasikan dan penyuluhan tidak hanya pada petugas BPLHD juga diperkenalkan pada pemilik pabrik industri. Kelengkapan/ fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung kinerja petugas lapangan BPLH.

- b. Pada konteks dimensi Penilai (*assessor*), Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan survei kelapangan ditemukan pabrik industri yang membuang IPAL tidak sesuai dengan peruntukannya dan kadar limbah sudah melebihi ambang batas. Hal ini mengakibatkan makin tingginya tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana

dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.

- c. Pada konteks dimensi umpan balik (*affector*), hasil penelitian dilapangan Pihak BPLH selalu merekapitulasi terhadap kegiatan penilaian hasil uji air limbah di Laboratorium setiap satu bulan sekali, perbandingan ini dilakukan dengan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini sesuai dengan Baku Mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan dana atau anggaran kegiatan yang terdiri dari pemantauan kualitas lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan, penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
2. Pelaksanaan Pengendalian Oleh BPLHD dalam Penertiban IPAL di Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdapat faktor penghambat. Upaya yang dilakukan pemerintah BPLHD untuk mengatasi hambatan dalam pengendalian penertiban IPAL di Kawasan Industri Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung antara lain dengan melakukan Peninjauan dan klarifikasi izin pabrik yang beroperasi di Kecamatan. Majalaya,

Mengembangkan sistem IPAL terpadu/ kolektif pada zona-zona industri, mengarahkan zona-zona industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu, Mengarahkan pembangunan industri ke dalam zona industri yang sudah ada. Mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif, dan pengambilan air tanah dalam dikendalikan secara ketat melalui kajian daya dukung air dan mengadakan pembinaan dan pengawasan yang intensif untuk meningkatkan penataan secara signifikan bagi para pengusaha pabrik industri.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan:

1. Sebaiknya BPLHD melakukan peninjauan dan klarifikasi izin pabrik yang beroperasi di Kecamatan Majalaya.
2. Sebaiknya BPLHD mengembangkan sistem IPAL terpadu/ kolektif pada zona-zona industri, mengarahkan zona-zona industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu,
3. Mengarahkan pembangunan industri ke dalam zona industri yang sudah ada.

4. Hendaknya BPLHD melakukan pengaturan secara ketat terhadap industri-industri polutif, dan pengambilan air tanah dalam dikendalikan secara ketat melalui kajian daya dukung air.
5. Mengadakan pembinaan dan pengawasan yang intensif untuk meningkatkan penataan secara signifikan bagi para pengusaha pabrik industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan.2005. Management Control System, Sistem Pengendalian Manajemen. Buku 1. Jakarta: PN Salemba Empat.

Sugiyono.2003,.Metodologi PenelitianAdministratif, Bandung: Alfa Beta.

_____.2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Dokumen dan Sumber Lain:

Propinsi Jawa Barat. 2004. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

_____.2010. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengendalian.